

Jurnal HAM merupakan sebuah platform ilmiah yang bertujuan untuk mendiseminasikan dan mengembangkan hasil-hasil riset hak asasi manusia baik pada tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Mengingat studi hak asasi manusia banyak melibatkan elemen-elemen keilmuan yang bersifat interdisipliner, Jurnal HAM menerima submisi artikel ilmiah yang membahas hak asasi manusia dari lensa, namun tidak terbatas pada, ilmu hukum, ilmu sosial, politik, bahasa, hubungan internasional, hingga komunikasi.

1. **Pembina** : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
2. **Pengarah** :
 1. Sekretaris Balitbang Hukum dan HAM
 2. Kepala Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan HAM
 3. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan HAM
 4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum
 5. Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
3. **Redaktur/Dewan Redaksi** :
 1. AhyarAri Gayo, S.H., M.H., APU
 2. Firdaus, S.Sos., M.H.
4. **Tim E-Journal**
 - Journal Manager** : Fitriyani, S.H., M.Si.
 - Penyunting/Editor** :
 1. Oki Wahyu Budijanto, S.E., M.M.
 2. TonyYuri Rahmanto, S.H., M.H.
 3. Harison Citrawan, S.H., L.L.M.
5. **Sekretaris** :
 1. Asmadi, S.H.
 2. Virsyah Jayadilaga, S.Si., M.P.
6. **Tata Usaha** :
 1. B. Lora Christyanti S.IP
 2. Lindung Budi Mulyawan, S.H
7. **Teknologi Informasi dan Desain Layout** :
 1. Machyudhie, S.T.
 2. Agus Priyatna, S.Kom.
 3. Harysandy Permana, S.Kom.
8. **Mitra Bestari** :
 1. Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi
(Universitas Sebelas Maret/Hukum Administrasi Negara, Hukum Lingkungan)
 2. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D.
(Universitas Padjajaran/Hukum Konstitusional, Hukum Hak Asasi Manusia)
 3. Prof.Dr. Rianto Adi, M.A.
(Universitas Atma Jaya/Sosiologi Hukum)
 4. Dr. Kholis Roisah, S.H., M.H.
(Universitas Diponegoro/Hukum Internasional, Hukum Kekayaan Intelektual)
 5. Dr. Herlambang P. Wiratraman, S.H., M.H.
(Universitas Airlangga/Hukum Tata Negara, HAM)

Alamat Redaksi

Gedung Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Jl. HR Rasuna Said Kav. 4-5 Kuningan, Jakarta Selatan (12940)
Telepon (021) 2525015 (ext. 514); (021) 2522952; Faksimili (021) 2522952
E-mail: ejournalham@gmail.com / pusbangdatin@gmail.com

Percetakan PT. Pohon Cahaya

Jl. Gedung Baru Nomor 18 Jakarta Barat (11440)
Telepon (021) 5600111; Faksimili (021) 5670340

Catatan

Redaksi menerima naskah asli yang aktual dalam bidang Hak Asasi Manusia berupa hasil penelitian dari berbagai kalangan, seperti: Peneliti Hak Asasi Manusia, praktisi dan teoritis serta kalangan lainnya. Tulisan-tulisan yang dimuat merupakan hasil penelitian terbaru yang memuat data dan fakta serta pendapat para ahli maupun pribadi penulisnya, bukan merupakan pendapat redaksi.

Redaksi berhak tidak menerima, menyingkat naskah tulisan yang dikoreksi dari segi teknis penulisan sepanjang tidak mengubah isi tulisan. Naskah tulisan, maksimal 16 halaman, dikirim melalui Open Journal System (OJS) pada ejournal.balitbangham.go.id.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
PENGANTAR REDAKSI	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
KUMPULAN ABSTRAK	ix
Pengarusutamaan Prinsip-Prinsip Bisnis dan Hak Asasi Manusia Bagi Sektor Pariwisata di Indonesia (<i>Mainstreaming Business and Human Rights Principles for Tourism Sector in Indonesia</i>).....	1
Yesaya Sandang	
Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia (<i>The Right to Vote for Persons with Mental Disabilities: Human Rights Perspective</i>)	19
Tony Yuri Rahmanto	
Pelayanan Publik Keimigrasian Berbasis HAM Sebagai Perwujudan Tata Nilai “PASTI” Kemenkumham (<i>The Human Right-Based Public Service to Perform Values of “PASTI” At Ministry of Law and Human Rights</i>).....	39
Pramella Yunidar Pasaribu dan Bobby Briando	
Kebebasan Beragama Sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia (<i>Freedom of Religion as Part of Human Rights</i>).....	57
Victorio H. Situmorang	
Pembatasan Perlindungan Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (<i>Intellectual Property Protection (Copy Right) in Perspective Human Rights</i>).....	69
Sudjana	
Pelokalan Hak Asasi Manusia Melalui Partisipasi Publik dalam Kebijakan Berbasis Hak Asasi Manusia (<i>Localizing Human Rights through Public Participation in Human Rights-Based Policy</i>).....	85
Sabrina Nadilla	
Perbandingan Sistem Dan Mekanisme HAM Negara-Negara Anggota Asean: Tinjauan Konstitusi dan Kelembagaan (<i>Comparison of Human Rights System and Mechanism of ASEAN Member State: Constitutional and Institutional Perspective</i>).....	99
Budi Hermawan Bangun	
Pelaksanaan dan Perlindungan Akses Hak Pekerja Wanita di Indonesia: Telaah Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Atas Konvensi ILO (<i>Protection and Access to Women's Workers Rights in Indonesia: Review of Law No. 13 of 2003 Concerning Labor of the ILO Convention</i>)	115
Desia Rakhma Banjarani dan Ricco Andreas	
BIODATA PENULIS	xvii
PEDOMAN PENULISAN	xix

PENGANTAR REDAKSI

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga di tahun 2019 ini Redaksi dapat menerbitkan tulisan pada edisi kedua yaitu Jurnal HAM Volume 10 Nomor 1 Juli 2019. Seperti penerbitan pada volume sebelumnya, pada volume kesepuluh dimuat 8 (delapan) karya tulis ilmiah yang merupakan hasil-hasil penelitian maupun tinjauan ilmiah para peneliti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM maupun penulis dari instansi lain.

Pada terbitan Volume 10 Nomor 1 Juli Tahun 2019, Jurnal HAM menerbitkan tulisan yang mengulas beragam isu HAM, yaitu hak memilih dan dipilih, hak penyandang disabilitas, kebebasan beragama, pembatasan perlindungan kekayaan intelektual, dan akses hak pekerja wanita. Ruang lingkup tulisan dalam edisi ini dimulai dari level lokal hingga di tingkat ASEAN dengan melibatkan prinsip-prinsip bisnis, sektor pariwisata. Tulisan-tulisan tersebut diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang HAM bagi para pembaca.

Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI yang telah memberikan dukungan dalam penerbitan Jurnal HAM ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Mitra Bestari yang telah bersedia membantu memeriksa dan mengoreksi tulisan dari para penulis. Kami juga menerima kritik dan saran dalam rangka peningkatan kualitas Jurnal HAM baik dari sisi pengelolaan *Open Jurnal System* maupun dari sisi materi tulisan. Selamat membaca.

Jakarta Juli 2019

Redaksi

UCAPAN TERIMA KASIH UNTUK MITRA BESTARI

Redaksi Jurnal HAM mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada mitra bestari yang telah *review* artikel-artikel yang diterbitkan dalam Jurnal HAM Volume 10, Nomor 1, Edisi Juli 2019. Mitra bestari tersebut yaitu:

1. Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi.
(Universitas Sebelas Maret /Hukum Administrasi Negara/Hukum Lingkungan)
2. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D,
(Universitas Padjajaran/Hukum Konstitusional, Hukum Hak Asasi Manusia)
3. Prof. Dr. Rianto Adi, M.A.
(Universitas Atma Jaya/ Sosiologi Hukum)
4. Dr. Kholis Roisah, S.H., M.H.
(Universitas Diponegoro/Hukum Internasional, Hukum Kekayaan Intelektual)
5. Dr. Herlambang P. Wiratraman, S.H., M.H.
(Universitas Airlangga/ Hukum Tata Negara, HAM)

Jurnal

HAM

Volume 10, Nomor 1, Juli 2019

Akreditasi: Kep. Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan
Kemenristekdikti:
No. 3/E/KPT/2019

p-ISSN 1693-8704
e-ISSN 2579-8553

**The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in article.
This abstract sheet may be reproduced without any permission and free of charge**

Yesaya Sandang (The Interdisipliner Faculty of Satya Wacana Christian University)

Mainstreaming the Business and Human Rights Principles to Indonesian Tourism

Jurnal HAM, Volume 10, Issue 1, Juli 2019, page 1-17

As one of the development sectors that keep on growing rapidly in Indonesia, tourism must not be separated from the discussions related to human rights. Therefore, efforts have been made in this article to further examine the relationship between tourism and human rights and to systematically categorize the domains of the discussions. Using the literature study approach, this article systematically reviews some discussion groups on tourism and human rights and relate one of them, the United Nations Guiding Principle (UNGP) on Business and Human Rights, to the latest developments in business and human rights issues. This article aims to introduce the relationship between business and human rights principles into the tourism sector while at the same time discussing the opportunities and challenges of mainstreaming the principles to Indonesian tourism. In conclusion, managing the human rights dimension in relation with tourism requires a highly careful approach (principle of prudent). The main concern is to what extent the strict implementation of mainstreaming business and human rights principles to tourism sector should be. In brief, all that has been mandated by the tourism law needs to be further elaborated on various levels of regulations (down to the tourism destination level) and to the tourism business sub-sectors. At the end, some strategic recommendations are offered in an effort to mainstream the business and human rights principles for the Indonesian tourism sector.

Keywords: human rights; tourism; UNGP.

Tony Yuri Rahmanto (The Agency of Research and Development of Law and Human Rights)

The Right to Vote for People with Mental Disabilities Viewed from The Human Rights Perspective

Jurnal HAM, Volume 10, Issue 1, Juli 2019, page 19-37

The dynamics of Indonesian politics at the end of 2018 have once again been warmed triggered by the issuance of a Circular Letter by the General Election Commission of the Republic of Indonesia that provides for that the people with mental disabilities could have the right to vote, and consequently they must also be registered as voters. This has raised so many opinions where eventually in favor of this, the government accommodates the right to vote of the people with mental disabilities but on the other hand, concerns also arouse whether these people with mental disabilities could appropriately exercise their right to vote or not. The purpose of this paper is to provide a comprehensive understanding on the people with mental disabilities, describing the legal grounds for the right to vote of those people with mental disabilities and at the same time describing the right to vote of the people with mental disabilities viewed from the Human Rights perspective. This research is a normative legal research with a qualitative approach aiming to discover the facts and to present the prevailing situation, phenomena, and circumstances based on a literature study. This paper describes that people with mental disabilities still deserve the right to vote in the general elections since, so far, there has been no restriction for the people with mental disabilities to exercise such right. While from the perspective of human rights, conferring the right to vote to the people with mental disabilities should absolutely be a must since the people with mental disabilities are also parts of the citizens conferred with such right by the state to enable them to procedurally participate in the democratic processes.

Keywords: right to vote; people with mental disabilities; human rights.

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in article.

This abstract sheet may be reproduced without any permission and free of charge

Pramella Yunidar Pasaribu and Bobby Briando (The Immigration Polytechnic)

Human Rights-Based Immigration Public Services as The Realization of the “PASTI” Value of The Ministry of Law and Human Rights

Jurnal HAM, Volume 10, Issue 1, Juli 2019, page 39-55

By the issuance of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. 27 of 2018 regarding Compensation for Human Rights-Based Public Service, the immigration officials that form a part of the public services must adapt all forms of its services to be Human Rights-based ones. The purpose of this paper is to shape a new concept of the human rights-based immigration services in accordance with Pancasila values. The research uses a descriptive qualitative approach method, further the substance and context as well as the reflection of the Pancasila values are analyzed qualitatively. Pancasila is the living philosophy of the nation and should serve as the only reference in internalizing the principles of human rights, in particular in providing the services to the public. Conclusion shows that Pancasila values must be put on top priority in providing Human Rights-based Immigration Services to the people. The author suggests that the immigration public service must always put the Human Rights in top priority in accordance with the philosophy of Pancasila and the self-identity of the Indonesians.

Keywords: public service; human rights; Pancasila.

Victorio H. Situmorang (The Agency of Research and Development of Law and Human Rights)

Freedom of Religion as Part of Human Rights

Jurnal HAM, Volume 10, Issue 1, Juli 2019, page 57-67

Violations against freedom of religion have still been rampant in Indonesia. This certainly has violated the human rights regulated under Article 22 of the Law No. 39 of 1999 regarding Human Rights. The purpose of this study is to highlight why there are still so many violations of freedom of religion or so many intolerant discriminative behaviors, a more common term of this behavior, that tends to be anarchic. The research uses normative juridical method with a qualitative approach, by collecting and utilizing the information related to the problems in this study. This research is descriptive analytical in nature. The data source is secondary data. So many incidents or cases of discriminative intolerance should certainly be a signal for the Indonesian government to urgently make improvements and evaluations in the law enforcement and government apparatuses fields, including to comprehensively encourage the people, either by means of educational system or by socialization to the people that freedom of religion is a part of human rights.

Keywords: human rights; freedom of religion; laws.

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in article.

This abstract sheet may be reproduced without any permission and free of charge

Sudjana (The Faculty of Law of Padjajaran University)

Intellectual Property Protection (Copy Right) in Perspective Human Rights

Jurnal HAM, Volume 10, Issue 1, Juli 2019, page 69-83

This country's constitution provides for protection for the human rights, as they are the basic rights inherent to all humans and are universal that all should protect and no one should prejudice them. The purpose of this study is to view the limitations of Intellectual Property (Copyright) protection in the perspective of human rights, so that they are expected to be theoretically and practically useful. This research is descriptive analytical in nature, using data sources from literature study, documentary study and data collection techniques, with qualitative normative data analysis method. The results of the study indicate that limitations in obtaining the Intellectual Property (Copyright) in accordance with legislation include limitations on its protection; unprotectable works; works that are not Copyright-able; acts not considered as Copyright infringement; reasonable use. Based on the systematic interpretation of the laws and regulations of human rights and copyrights as well as the doctrine of the rights whose fulfillment may be limited, the limitations in obtaining the copyright do not conflict with the human rights. The author suggests that the government need to provide a comprehensive understanding to the public regarding science, art and culture with potential to obtain Copyright and also on Copyright limitation according to the laws, considering that Copyright piracy is higher when compared to the infringement of the other Intellectual Properties.

Keywords: protection; copyright; human rights.

Sabrina Nadilla (The Agency of Research and Development of Law and Human Rights)

Localizing Human Rights by Public Participation in Human Rights-Based Policies

Jurnal HAM, Volume 10, Issue 1, Juli 2019, page 85-98

Efforts had been made to take Human Rights values down to the local levels since the 1990s, by means of many concepts, one of which is the adoption of human rights policies at the city level. The concept has challenged the approach that all this time centers only around the state and opened more spaces for the ideas that the implementation of human rights values should be a concern of all government levels, not limited only to the central government as it is today. In the context of Indonesia, the efforts in localizing the human rights values have been made by means of some pro-human rights policies. These include the awards for the district/city that have demonstrated their care to human rights values, which awards among other are granted by the Ministry of Law and Human Rights, and the Bandung City Human Rights project. This study uses a qualitative approach based on case studies. Analysis is made by applying the concept of human rights-based approach in human rights policies. In the human rights localization perspective, human rights policies in the city of Bandung have shown some indications. Firstly, the Bandung Declaration of Human Rights, that should have been considered as a bottom-up human rights-based policy, has not been able to support the efforts to localize the human rights values in the city of Bandung. Secondly, the Human Rights Cities Award as a top-down policy, despite of gaining some positive responses from the government and vertical governmental agencies that form parts of the policies' implementer, has failed to secure adequate legitimacy from the citizen of Bandung.

Keywords: human rights localization; human rights-based policies; public participation.

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in article.

This abstract sheet may be reproduced without any permission and free of charge

Budi Hermawan Bangun (Faculty of Law of Tanjungpura University)

Comparison of The Human Rights System and Mechanism of Asean Members: A Constitutional and Institutional Review

Jurnal HAM, Volume 10, Issue 1, Juli 2019, page 99-113

The development of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) in human rights promotion and protection as the realization of the goals of ASEAN on the other hand must encounter the principles of state sovereignty the ASEAN member countries still strictly uphold as well as conspicuous difference in political and governmental system among the member countries. This paper focuses on the influence of the national human rights systems and mechanisms of the ASEAN member countries, in particular those that are demonstrated by the human rights protection in their constitution and establishment of human rights-related institutions. Following the discussion and analysis, the results show that the national human rights systems and mechanisms of the ASEAN member countries that are demonstrated by the human rights protection in their constitution and establishment of human rights-related institutions are quite different, however they serve also as adequate modality for the human rights systems and mechanisms of ASEAN as a regional organization.

Keywords: systems and mechanisms; human rights; ASEAN.

Desia Rakhma Banjarani dan Ricco Andreas (Faculty of Law of Lampung University)

Implementation and Protection of Access to Female Workers' Rights in Indonesia: Review on The Law No. 13 Of 2003 Regarding Manpower Under the ILO Convention

Jurnal HAM, Volume 10, Issue 1, Juli 2019, page 115-126

Despite the fact that Indonesia has ratified some conventions of the International Labor Organization (ILO) that provide for gender equality, there are still many violations against the convention. The year 2016 still saw many female workers in some regions in Indonesia experiencing discriminations. The forms of the discrimination range from the gaps in the right to work to sexual harassment. The problem the researcher discusses is how to implement and protect the access to the rights of the female workers based on ILO Conventions and Law No. 13 of 2003 regarding Manpower? The research uses normative legal research method. It also employs legal regulations approach. The results of the study demonstrate that in principle the basic rights of women workers, as may be referred to in the ILO Convention, include equality in wages, freedom from discrimination in the work and position, protection during pregnancy and equal right to workers with dependant relatives. These rights, however, have also been provided for and specified in the Indonesian Law No. 13 of 2003 regarding Manpower. However, in reality, there are some female workers' rights that have not been satisfied in many Indonesian companies, among others, the reproductive right, the right to maternity leave, protection from sexual harassment and discrimination of wage, position and benefits. Hence, in order to satisfy the rights of women workers, the Indonesian government has been making some efforts as the realization of implementation of the ILO Convention in Indonesia.

Keywords: female workers; ILO conventions; protection.

Kata kunci Bersumber dari Artikel
Lembar abstrak Ini Dickey Tanpa Izin dan Biaya

Yesaya Sandang (Fakultas Interdisipliner Universitas Kristen Satya Wacana)

Pengarusutamaan Prinsip-Prinsip Bisnis dan Hak Asasi Manusia Bagi Sektor Pariwisata di Indonesia

Jurnal HAM, Volume 10, Nomor 1, Juli 2019, hal. 1-17

Sebagai salah satu sektor pembangunan yang terus berkembang pesat di Indonesia, kepariwisataan tidak terpisahkan dari pembahasan hak asasi manusia. Oleh karena itu, artikel ini berupaya untuk mengulas lebih jauh hubungan antara pariwisata dan hak asasi manusia serta mengkategorikan berbagai ranah pembahasannya secara sistematis. Dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan, artikel ini secara sistematis mengulas berbagai kelompok pembahasan pariwisata dan hak asasi manusia serta mengaitkan salah satunya dengan perkembangan terkini dalam area bisnis dan hak asasi manusia, yakni *Guiding Principle on Business and Human Rights (UNGPs)*. Artikel ini memiliki tujuan untuk memperkenalkan hubungan prinsip-prinsip bisnis dan hak asasi manusia ke dalam sektor pariwisata sembari membahas peluang dan tantangan pengarusutamaan prinsip-prinsip tersebut bagi kepariwisataan di Indonesia. Kesimpulannya, mengelola dimensi HAM dalam hubungannya dengan kepariwisataan membutuhkan pendekatan yang saksama (prinsip kehati-hatian). Perhatian utama perlu diberikan terhadap sejauh mana terdapat ketegasan untuk mengarusutamakan implementasi bisnis dan HAM bagi usaha pariwisata. Singkatnya, apa yang telah diamanatkan oleh undang-undang kepariwisataan masih perlu dielaborasi lebih jauh pada berbagai jenjang regulasi (hingga ke tingkat destinasi) dan subsektor usaha pariwisata. Pada akhirnya, diajukan beberapa rekomendasi strategis dalam upaya mengarusutamakan prinsip-prinsip bisnis dan HAM bagi sektor pariwisata di Indonesia.

Kata Kunci: hak asasi manusia; kepariwisataan; UNGP.

Tony Yuri Rahmanto (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM)

Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Jurnal HAM, Volume 10, Nomor 1, Juli 2019, hal. 19-37

Dinamika politik di Indonesia pada penghujung tahun 2018 kembali hangat disebabkan oleh terbitnya Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas mental berhak memperoleh hak pilih sehingga dapat didata sebagai pemilih. Hal tersebut menimbulkan pendapat beragam dimana akhirnya pemerintah mengakomodir hak penyandang disabilitas mental namun disisi lain memunculkan kekhawatiran bagi penyandang disabilitas mental apakah dapat menggunakan hak pilihnya secara baik dan benar atau tidak. Tujuan penulisan ini untuk memberikan pengertian komprehensif mengenai penyandang disabilitas mental, mendeskripsikan dasar hukum terkait hak pilih bagi penyandang disabilitas mental dan mendeskripsikan hak pilih penyandang disabilitas mental ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengungkap fakta dan menyuguhkan apa adanya keadaan, fenomena, serta keadaan yang terjadi berdasarkan studi kepustakaan. Dalam penulisan ini mendeskripsikan bahwa penyandang disabilitas mental sejatinya tetap dapat diberikan hak pilih dalam pemilihan umum karena sejauh ini tidak ada larangan bagi penyandang disabilitas mental untuk memperoleh haknya. Sementara dari perspektif HAM memandang bahwa pemberian hak pilih bagi penyandang disabilitas adalah mutlak karena penyandang disabilitas mental juga merupakan bagian dari warga negara yang diberikan hak oleh negara untuk dapat berpartisipasi dalam proses demokrasi secara prosedural.

Kata kunci: hak pilih; penyandang disabilitas mental; hak asasi manusia.

Kata kunci Bersumber dari Artikel
Lembar abstrak Ini Dickey Tanpa Izin dan Biaya

Pramella Yunidar Pasaribu dan Bobby Briando (Politeknik Imigrasi)

**Pelayanan Publik Keimigrasian Berbasis HAM sebagai Perwujudan Tata Nilai “PASTI”
Kemenkumham**

Jurnal HAM, Volume 10, Nomor 1, Juli 2019, hal. 39-55

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia, jajaran keimigrasian yang merupakan bagian dari pelayanan publik harus menyesuaikan segala bentuk pelayanan berbasis pada Hak Asasi Manusia. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk membangun konsep baru pelayanan keimigrasian berbasis Hak Asasi Manusia sesuai nilai-nilai Pancasila. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, kemudian dilakukan analisis secara kualitatif terhadap substansi dan konteks serta refleksi terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila merupakan falsafah kehidupan bangsa dan harus menjadi satu-satunya rujukan dalam menginternalisasikan prinsip Hak Asasi Manusia khususnya dalam memberikan pelayanan kepada publik. Kesimpulan menunjukkan bahwa Pelayanan Publik Keimigrasian berbasis Hak Asasi Manusia berdasarkan nilai-nilai Pancasila harus menjadi prioritas utama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Saran penulis adalah agar pelayanan publik keimigrasian selalu mengutamakan Hak Asasi Manusia yang sesuai dengan falsafah Pancasila dan jati diri bangsa Indonesia.

Kata Kunci: pelayanan publik; hak asasi manusia; Pancasila.

Victorio H. Situmorang (Peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM)

Kebebasan Beragama Sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia

Jurnal HAM, Volume 10, Nomor 1, Juli 2019, hal. 57-67

Pelanggaran terhadap kebebasan beragama masih saja terjadi di Indonesia. Hal tersebut tentunya melanggar hak asasi manusia yang mana telah diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk menyoroti mengapa masih saja terjadi pelanggaran terhadap kebebasan beragama atau sering diistilahkan perilaku intoleransi diskriminatif yang cenderung bersifat anarkis. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan dan memanfaatkan informasi terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. Adapun sifat penelitian ini adalah analisis deskriptif. Sumber data adalah data sekunder. Dengan masih saja terjadinya peristiwa atau kasus intoleransi diskriminatif, tentunya merupakan sinyal bagi pemerintah Indonesia untuk melakukan berbagai pembenahan dan evaluasi di sektor penegakan hukum dan aparat pemerintah, berikut pembinaan terhadap masyarakat secara menyeluruh, baik melalui sistem pendidikan sekolah maupun sosialisasi tentang kebebasan beragama yang merupakan bagian dari hak asasi manusia

Kata kunci: hak asasi manusia; kebebasan beragama; hukum.

Kata kunci Bersumber dari Artikel
Lembar abstrak Ini Dicopy Tanpa Izin dan Biaya

Sudjana (Fakultas Hukum Universitas Padjajaran)

Pembatasan Perlindungan Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Jurnal HAM, Volume 10, Nomor 1, Juli 2019, hal. 69-83

Negara hukum memberikan perlindungan terhadap HAM, karena merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia dan universal, sehingga harus dilindungi dan tidak boleh dikurangi, oleh siapapun. Tujuan penelitian ini adalah menentukan pembatasan Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) dalam perspektif HAM, sehingga diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan sumber data dari hasil studi kepustakaan, teknik pengumpulan data studi dokumen, dan dengan metode analisis data normatif kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembatasan untuk mendapatkan Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) sesuai perundang-undangan mencakup pembatasan perlindungan; hasil karya yang tidak dilindungi; karya yang tidak Hak Cipta; perbuatan yang tidak dianggap pelanggaran Hak Cipta; penggunaan yang wajar. Berdasarkan penafsiran sistematis perundang-undangan di bidang HAM dan Hak Cipta serta doktrin hak yang dapat dibatasi pemenuhannya, maka pembatasan untuk mendapatkan Hak Cipta tidak bertentangan dengan HAM. Saran yang diberikan penulis adalah pemerintah perlu memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat tentang ilmu pengetahuan, seni dan budaya yang berpotensi mendapatkan Hak Cipta dan pembatasan Hak Cipta sesuai perundang-undangan, mengingat pembajakan di bidang Hak Cipta lebih banyak dibandingkan dengan Kekayaan Intelektual lainnya.

Kata kunci: perlindungan; hak cipta; hak asasi manusia.

Sabrina Nadilla (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM)

Pelokalan Hak Asasi Manusia Melalui Partisipasi Publik dalam Kebijakan Berbasis Hak Asasi Manusia

Jurnal HAM, Volume 10, Nomor 1, Juli 2019, hal. 85-98

Upaya untuk membawa nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) ke tingkat lokal sudah mencuat sejak 1990-an, melalui berbagai konsep, salah satunya *human rights in the city*. Konsep tersebut menantang pendekatan HAM yang selama ini hanya terpusat pada negara, sehingga membuka ruang bagi ide bahwa implementasi nilai-nilai HAM harus ditangani oleh berbagai tingkatan pemerintahan, bukan lagi terbatas pada pemerintah pusat. Dalam konteks Indonesia, upaya melokalkan nilai-nilai HAM telah dilakukan melalui berbagai kebijakan hak asasi manusia. Kebijakan tersebut antara lain penghargaan kabupaten/kota peduli HAM yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan proyek Kota HAM Bandung. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berbasis pada studi kasus, analisis dilakukan dengan menerapkan konsep pendekatan hak asasi manusia (*human rights-based approach*) dalam kebijakan hak asasi manusia. Dalam perspektif pelokalan hak asasi manusia, kebijakan HAM di Kota Bandung menunjukkan beberapa indikasi. Pertama, kebijakan Deklarasi HAM Bandung sebagai suatu kebijakan berbasis hak asasi manusia yang bersifat *bottom-up* masih belum mampu mendukung upaya pelokalan HAM di kota Bandung. Kedua, kebijakan Penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM sebagai suatu kebijakan yang bersifat *top-down*, meskipun mendapatkan respons positif dari pemerintah kota dan instansi vertikal sebagai bagian dari pelaksana kebijakan, tidak mendapatkan legitimasi yang cukup dari masyarakat kota Bandung.

Kata Kunci: pelokalan HAM; kebijakan berbasis HAM; partisipasi publik.

Kata kunci Bersumber dari Artikel
Lembar abstrak Ini Dickey Tanpa Izin dan Biaya

Budi Hermawan Bangun (Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura)

Perbandingan Sistem dan Mekanisme HAM Negara-Negara Anggota Asean: Tinjauan Konstitusi dan Kelembagaan

Jurnal HAM, Volume 10, Nomor 1, Juli 2019, hal. 99-113

Perkembangan *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)* dalam pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai perwujudan dari komunitas *ASEAN* pada sisi lain berhadapan dengan prinsip kedaulatan negara yang dipegang teguh oleh negara anggota *ASEAN* serta adanya perbedaan sistem politik dan pemerintahan yang mencolok dari negara-negara anggota. Tulisan ini berfokus pada pengaruh dari sistem dan mekanisme HAM nasional negara-negara anggota *ASEAN* terutama yang ditunjukkan melalui perlindungan HAM dalam konstitusi dan kelembagaan yang berkaitan dengan HAM. Melalui pembahasan dan analisis didapatkan hasil bahwa sistem dan mekanisme HAM nasional negara-negara anggota *ASEAN* yang ditunjukkan melalui perlindungan HAM dalam konstitusinya maupun melalui pembentukan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan HAM sesungguhnya cukup beragam, namun dapat menjadi modalitas yang memadai bagi sistem dan mekanisme HAM *ASEAN* sebagai organisasi regional.

Kata Kunci: sistem dan mekanisme; hak asasi manusia; *ASEAN*.

Desia Rakhma Banjarani dan Ricco Andreas (Fakultas Hukum Universitas Lampung)

Pelaksanaan dan Perlindungan Akses Hak Pekerja Wanita di Indonesia: Telaah Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan atas Konvensi ILO

Jurnal HAM, Volume 10, Nomor 1, Juli 2019, hal. 115-126

Meskipun Indonesia sudah meratifikasi konvensi-konvensi International Labor Organization (ILO) yang mengatur tentang kesetaraan gender, namun faktanya masih banyak berbagai pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan konvensi tersebut. Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa buruh perempuan di berbagai daerah di Indonesia masih mengalami diskriminasi. Bentuk diskriminasi mulai dari kesenjangan hak kerja, hingga pelecehan seksual. Permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti adalah bagaimana pelaksanaan dan perlindungan akses hak pekerja wanita berdasarkan Konvensi ILO dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya hak-hak pekerja wanita sebagaimana mengacu pada Konvensi ILO terdiri dari kesetaraan upah, diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan, perlindungan kehamilan dan pekerja dengan tanggung jawab keluarga. Hak-hak tersebut juga telah diatur dan termuat dalam hukum Indonesia yakni dalam UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun dalam praktiknya, masih terdapat beberapa hak pekerja wanita yang belum terpenuhi di berbagai perusahaan Indonesia, seperti hak reproduktif, hak cuti melahirkan, hak perlindungan dari kekerasan seksual serta terjadinya diskriminasi upah, jabatan, dan diskriminasi tunjangan. Sehingga dalam rangka untuk memenuhi hak-hak pekerja wanita, pemerintah Indonesia melakukan berbagai wujud nyata sebagai bentuk Implementasi dari Konvensi ILO di Indonesia.

Kata Kunci: pekerja wanita; konvensi ILO; perlindungan.